UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Kebijakan Kehutanan Sensitif Gender dalam Konteks Perubahan Iklim di Indonesia
AMELIA EFRINA, Prof. Dr. Ahmad Maryudi, S.Hut., M.For. ; Dra. Lintje H. Pellu, M.Si., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

KEBIJAKAN KEHUTANAN SENSITIF GENDER DALAM KONTEKS PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA

Amelia Efrina[1], Ahmad Maryudi[1], Lintje H. Pellu[2]
[1]Magister Ilmu Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada. [2]Dosen Universitas Kristen Artha Wacana

INTISARI

Perubahan iklim telah memicu bencana hidrometeorologi di Indonesia, menempatkan sektor kehutanan pada posisi sentral dalam mitigasi melalui target *FOLU Net Sink 2030*. Namun, dampak krisis ini tidak dirasakan merata akibat relasi gender yang menciptakan perbedaan kerentanan dan kapasitas adaptasi masyarakat sekitar hutan. Meskipun Indonesia telah mengamanatkan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Instruksi Presiden No.9 tahun 2000, regulasi sektor kehutanan saat ini masih didominasi oleh pendekatan teknokratis yang berasumsi netral gender. Oleh karena itu, penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengidentifikasi tipologi sensitivitas gender dan menganalisis integrasi aspek gender dalam kebijakan iklim tersebut.

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode analisis konten berbasis teori *Social Relations Approach* terhadap 56 regulasi nasional dan 6 dokumen kebijakan. Kategori sensitivitas gender pada regulasi terbagi menjadi: buta gender, netral gender, spesifik gender, dan transformative gender. Data ini diperkuat melalui triangulasi wawancara bersama pemangku kebijakan mencakup Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Penelitian menemukan bahwa kebijakan iklim nasional masih didominasi kategori **buta gender (*gender blind*)** sebesar 64,2% (36 regulasi) karena mengabaikan ketimpangan struktural. Selebihnya, hanya ditemukan 9 regulasi netral gender, 9 regulasi spesifik gender, dan 2 regulasi transformatif gender terbatas. Temuan ini mengonfirmasi adanya kesenjangan (*gap*) signifikan antara desain regulasi teknis dengan komitmen strategis dalam mewujudkan tata kelola iklim yang inklusif di Indonesia.

Kata kunci: Perubahan Iklim, Kebijakan, Kehutanan, Sensitivitas Gender, Tipologi Gender

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Kebijakan Kehutanan Sensitif Gender dalam Konteks Perubahan Iklim di Indonesia
AMELIA EFRINA, Prof. Dr. Ahmad Maryudi, S.Hut., M.For. ; Dra. Lintje H. Pellu, M.Si., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

GENDER-SENSITIVE FORESTRY POLICIES IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE IN INDONESIA

Amelia Efrina[1], Ahmad Maryudi[1], Lintje H. Pellu[2]
[1]Magister Ilmu Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada.[2]Dosen Universitas Kristen Artha Wacana

ABSTRACT

Climate change has triggered severe hydrometeorological disasters in Indonesia, placing the forestry sector in a central position for mitigation through the FOLU Net Sink 2030 target. However, the impacts of this crisis are unevenly distributed due to gender relations that create disparities in vulnerability and adaptive capacity among forest-dependent communities. Although Indonesia has mandated Gender Mainstreaming (PUG), current forestry regulations remain dominated by technocratic approaches that assume gender neutrality. Therefore, this qualitative study aims to identify gender sensitivity typologies and analyze the integration of gender aspects within these climate policies.

Utilizing policy content analysis based on the Social Relations Approach framework across 56 national regulations and 6 policy documents and complemented by triangulation interviews with key policymakers (Ministry of Forestry, Ministry of Environment, Ministry of Women Empowerment and Child Protection and Ministry of National Development Planning). The study reveals that national climate policies are overwhelmingly gender-blind at 64.2% (36 regulations), which overlook structural inequalities. The remaining policies consist of 9 gender-neutral, 9 gender-specific, and only 2 limited gender-transformative regulations. These findings confirm a significant gap between technical regulatory designs and strategic national commitments toward achieving inclusive climate governance in Indonesia.

Keywords: Climate Change, Policy, Forestry, Gender Sensitivity, Gender Typology